

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Jalan Harsono R.M. No.70, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550
Telepon (021) 7805814 Faksimile (021) 78844104

LEMBAR DISPOSISI

Nomor Agenda/Registrasi	: R.227	Tingkat Keamanan	: SR/ <input checked="" type="checkbox"/> /T/B
Tanggal Penerimaan	: 15/9/2021	Tingkat Kecepatan	: K/SS/ <input checked="" type="checkbox"/> /B
Tanggal dan Nomor Surat	: 13/9/2021 046/6539/IV/DISKOMINFO/2021		
Dari	: Kadiskominfo Prov. Sumatera Selatan		
Kepada	: Ka BSSN		
Tembusan	: -		
Ringkasan isi	: Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian Pemerintah Kab. Muara Enim T.A 2020		
Jumlah	: 34 lembar		

Kepada	Disposisi
1	2
YTH. SU Yth D3 D2	C-1 MUDK 16/9/2021 <u>e-2</u> Mudk <u>16/9/2021</u>



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Merdeka No.10 A Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Telpon/Faxmile (0711) 363480

Website : www.kominfo.sumselprov.go.id/ www.sumselprov.go.id/

e-mail:dinaskominfo@sumselprov.go.id

Nomor : 046/6539/IV/DISKOMINFO/2021

Palembang, 13 September 2021

Klasifikasi : Rahasia

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Urusan Persandian Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan T.A 2020

Yth. 1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara
2. Gubernur Sumatera Selatan

di -

Tempat

Dengan hormat,

Merujuk Surat Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor T.250/BSSN/D2/PP.01.02/08/2021
Tanggal 6 Agustus 2021 tentang permintaan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Urusan Persandian Pemda T.A 2020, berikut disampaikan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Urusan Persandian di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 dan Laporan
Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian di Pemerintah Kabupaten / Kota
se- Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020.

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS KOMINFO
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



H. ACHMAD RIZWAN, SSTP., M.M
NIP.198109232000121001

H. ACHMAD RIZWAN, SSTP., M.M
PEMBINA UTAMA MUDA(IV/c)
NIP. 198109232000121001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

**LAPORAN HASIL PEMANTAUAN
DAN EVALUASI URUSAN PERSANDIAN
DI KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2020**



**BIDANG PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2020**



PEMERINTAH KABUPATEN MUARAENIM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln.Bambang Utomo No.20 Telp (0734) 421175 Fax (0734) 424690
www.muaraenimkab.go.id Email : muaraenimkab@muaraenimkab.go.id

MUARA ENIM 31314

Muara Enim, 31 Agustus 2021

Nomor : 046/ 476 /Diskominfo/2021
Sifat : Rahasia
Lampiran : satu berkas
Hal : Laporan hasil pemantauan
Dan evaluasi penyelenggaraan
Urusan persandian
Kabupaten Muara Enim
Tahun 2020

Kepada
Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Selatan
di

Palembang

Merujuk surat Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor T.250/BSSN/D2/PP.D1.02/08/2021 hal laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan persandian Pemda TA 2020 berikut disampaikan laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan urusan Persandian di Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun 2020.

Demikian laporan ini disampaikan atas perhatiaannya diucapkan terima kasih.



Tebusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim
2. Yth. Inspektur Kabupaten Muara Enim

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 02 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim dan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 64 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 31 tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan. Bahwa pelaksanaan urusan Bidang Persandian dilaksanakan oleh Bidang Persandian dan Keamanan Informasi yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim. Mempunyai tugas di Bidang persandian dan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim yang meliputi bidang Tata Kelola Persandian, Keamanan Informasi serta Pengawasan dan Evaluasi Persandian serta mempunyai fungsi dalam penyelenggaraan Bidang Persandian dan Keamanan Informasi :

1. Penyediaan analisis kebutuhan penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi.
2. Penyediaan kebijakan penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi
3. Pengelolaan dan perlindungan infomasi
4. Pengelolaan sumber daya persandian meliputi sumber daya manusia, materiil sandi dan JKS serta Anggaran.
5. Penyelenggaraan operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi.
6. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian di seluruh perangkat Daerah, dan
7. Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan untuk pengamanan informasi.

Dalam mencapai tujuan tersebut Bidang Persandian dan Keamanan Informasi telah didukung dengan sumber daya dan juga dihadapkan dengan berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Untuk meningkatkan kinerja Bidang Persandian dan Keamanan Informasi telah dilakukan upaya identifikasi permasalahan dan tindakan perbaikan sesuai dengan tersedianya sumber daya yang ada.

Komitmen yang tinggi dan pelaksanaan kegiatan yang efektif akan membantu Bidang Persandian dan Keamanan Informasi untuk mencapai tujuan, yang pada akhirnya dapat membantu terciptanya keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. <i>Dasar Hukum</i>	1
B. <i>Tujuan</i>	1
BAB II HASIL EVALUASI PROGRAM URUSAN PERSANDIAN TAHUN ANGGARAN 2020	2
A. <i>Ringkasan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan</i>	2
B. <i>Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah</i>	3
C. <i>Rencana Program Kerja/Kegiatan Tahun 2021</i>	5
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN.....	6
A. <i>Kesimpulan</i>	6
B. <i>Saran</i>	6

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|---------------|---|
| LAMPIRAN I | – DAFTAR KELENGKAPAN SARANA KERJA DI PEMKAB MUARA ENIM |
| LAMPIRAN II | – SISTEM ELEKTRONIK PEMKAB MUARA ENIM |
| LAMPIRAN III | – DAFTAR SDM PERSANDIAN PEMKAB MUARA ENIM |
| LAMPIRAN IV | – DAFTAR SDM BERKUALIFIKASI KEAMANAN INFORMASI PEMKAB MUARA ENIM |
| LAMPIRAN V | – DAFTAR PERALATAN PERSANDIAN PEMKAB MUARA ENIM |
| LAMPIRAN VI | – DAFTAR PERSONIL / PEGAWAI BIDANG PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI DINAS KOMINFO KABUPATEN MUARA ENIM |
| LAMPIRAN VII | – DAFTAR KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI DI PEMKAB MUARA ENIM |
| LAMPIRAN VIII | – ORM KELENGKAPAN PERSONIL SDM DI BIDANG KEAMANAN INFORMASI (PENGAMAN SISTEM ELEKTRONIK) |
| LAMPIRAN IX | – DAFTAR SISTEM ELEKTRONIK DI PEMKAB MUARA ENIM |
| LAMPIRAN X | – DAFTAR KELENGKAPAN PENGELOLAAN DOKUMEN DI PEMKAB MUARA ENIM |
| LAMPIRAN XI | – DAFTAR LAYANAN KEAMANAN INFORMASI DI PEMKAB MUARA ENIM |
| LAMPIRAN XII | – DAFTAR POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI DI PEMKAB MUARA ENIM |
| LAMPIRAN XIII | – DAFTAR APLIKASI PERSURATAN ONLINE/ELEKTRONIK DI PEMKAB MUARA ENIM |

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Peraturan yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Persandian pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim, adalah :

1. Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintah Bidang Persandian.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim.
9. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 64 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muara Enim nomor 31 tahun 2016 Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan Kecamatan dan Kelurahan.

B. Tujuan

Penyusunan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian di Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran pelaksanaan penyelenggaraan persandian dalam satu tahun anggaran; dan
2. Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan penyelenggaraan persandian.

BAB II

HASIL EVALUASI PROGRAM URUSAN PERSANDIAN TAHUN ANGGARAN 2020

A. Ringkasan pelaksanaan program kerja dan kegiatan

Tahun Anggaran 2020 Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim memiliki 2 (dua) kegiatan, sesuai dengan data table dibawah ini dengan total biaya Anggaran Rp. 97.731.000,- (Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan capaian kegiatan 96,24 % serta serapan anggaran sebesar Rp. 94.059.000,- (sembilan puluh empat juta lima puluh Sembilan ribu rupiah).

Tabel Realisasi kegiatan

No	Ruang Lingkup	Jumlah Kegiatan	Realisasi Kegiatan	% Capaian
1.	Tata Kelola	1	1	100
2.	Keamanan Informasi	-	-	100
3.	Pengawasan dan evaluasi	1	1	100
	total			100

Tabel Realisasi Anggaran

No	Ruang Lingkup / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1.	Tata kelola/pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	31.218.000	31.218.000	100
2.	Pengawasan / Kontra Pengindraan Sterilisasi ruang Kerja dan Kediaman Kepala Daerah	66.513.000	62.841.000	94.48
	Total	97.731.000	94.069.000	96.24

Dari uraian diatas alokasi anggaran untuk pelayanan keamanan informasi yaitu kontra pengindraan / sterilisasi ruang kerja dan kediaman Kepala Daerah Anggaran cukup besar dan dilaksanakan 2 kali satu tahun yaitu persemester, di bulan April dan bulan Oktober 2020.

Sedangkan untuk kegiatan pengamanan informasi Daerah awalnya anggaran cukup besar dengan kegiatan penyusunan Dokumen Informasi yang dikecualikan Kabupaten Muara Enim namun dikarena kondisi di Indonesia Covid – 19 untuk pencegahan dan penularan virus covid – 19 sehingga tidak dapat terlaksana dan anggaran di refocussing.

B. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah

Sebagai sebuah Unit Teknis Persandian (UTP) yang berbentuk Bidang Persandian dan Keamanan Dinas, maka kegiatan Persandian menghadapi banyak persoalan dan tantangan. Berikut gambaran permasalahan yang dihadapi beserta upaya pananganannya.

Tabel
Kegiatan Bidang Pembinaan dan Pengawasan

No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah
1	Tata Kelola <ul style="list-style-type: none"> a. Minimnya SDM yang berkualifikasi ahli sandi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pada awal pembentukan Bidang Staistik dan Persandian, baru terdapat 1 org sandiman. Pada bulan Juli 2017 dikirim 1 org utk mengikuti diklat pembentukan sandiman dasar, sehingga tahun 2017 telah dimiliki 2 org sandiman, namun sandiman yang baru mengikuti diklat masih bertugas di Inspektorat sehingga sandiman yang bertugas di persandian masih tetap 1 orang. - Pada tahun tahun – tahun ke depan sudah direncanakan menugaskan staf untuk mengikuti diklat pembentukan sandiman
	<ul style="list-style-type: none"> b. Masih sangat kurangnya pemahaman terhadap fungsi persandian dan kesadaran terhadap keamanan informasi dilingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim 	<ul style="list-style-type: none"> - Direncanakan adanya upaya peningkatan pemahaman terhadap fungsi persandian melalui sosialisasi, bintek, workshop dll, bagi Kepala OPD secara keseluruhan maupun para petugas khusus yang menangani kemanan informasi di setiap OPD
	<ul style="list-style-type: none"> c. Masih minimnya produk hukum maupun pedoman operasional (SOP) persandian 	<ul style="list-style-type: none"> Tahun 2020 direncanakan untuk dipenuhi kebutuhan SOP dan rancangan peraturan daerah untuk memperkuat fungsi persandian
	d.	-

	e. Masih sangat minimnya dana yang dianggarkan untuk memaksimalkan penyelenggaraan persandian	- Diupayakan untuk meyakinkan unsur pimpinan daerah (bupati/wabup dan DPRD) bahwa persandian bersanding dengan keamanan siber menjadi isu strategis yang menjadi pilar penting dalam mengamankan informasi strategis pemerintah daerah
2	Operasional	
	a. Masih sangat rawannya sistem komunikasi antar dinas baik antar pejabat maupun antar lembaga	<ul style="list-style-type: none"> - Direncanakan untuk dilakukan upaya pembentukan jaring komunikasi sandi (JKS) - Secara bertahap mulai dilakukan upaya penguatan penerapan SPBE diantaranya dengan menggunakan fasilitas sertifikat elektronik
3	Pengawasan dan Evaluasi	
	Belum adanya penilaian atau supervisi dari BSSN terhadap aset dan implementasi persandian di Kabupaten Muara Enim	Diupayakan adanya assessment penyelenggaraan persandian baik oleh pusat maupun provinsi
4	Pembinaan dan Pengawasan	
	Dirasakan Masih belum optimalnya keikutsertaan dalam kegiatan bintek/workshop persandian	Diupayakan frekuensi keikutsertaan menghadiri workshop/bintek dll baik diprovinsi maupun pusat semakin ditingkatkan

C. Rencana Program Kerja/Kegiatan Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Bupati Muara Enim nomor 64 tahun 2018, Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika. Dengan demikian maka rencana kerja untuk fungsi persandian menginduk kepada rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim.

Adapun rencana kegiatan dan Anggaran Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021, adalah 3 (tiga) Kegiatan dengan total rencana Anggaran Rp. 230.749.000,-, sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini

Tabel

Rencana Kegiatan Tahun 2021

No	Nama Program Kerja	* Anggaran	Keterangan
1	Seksi Tata Kelola Persandian	Rp 95.098.324,-	
	a. Sosialisasi Persandian Kabupaten Muara Enim	Rp. 95.098.324,-	
2	Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian	Rp 88.441.150,-	
	a. Kegiatan Kontra Pengindraan / Strelisasi ruang kerja Bupati, Wakil Bupati dan ruang kerja Sekretaris Daerah serta rumah Dinas / rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah 2 kali setahun	Rp. 88.441.150,-	
3.	Seksi Keamanan Informasi	Rp.47.210.150,-	
	Sosialisasi internet sehat dan aman bagi anak		
Total Anggaran		Rp 47.210.150,-	

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berangkat dari adanya pemahaman bahwa iklim penyelenggaraan pemerintahan selalu bergerak dinamis, sehingga harus dapat mencermati dan mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi informasi terutama pada era siber seperti saat ini, maka pengamanan informasi dengan pemberdayaan fungsi persandian adalah sebuah solusi penting yang diambil oleh Pemerintah Republik Indonesia. Begitu juga langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan merevitalisasi unit persandian adalah bentuk upaya yang sejalan dengan langkah yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Namun tentunya Bidang Persandian dan Keamanan Informasi yang dari awal terbentuknya, disadari masih jauh dari kondisi yang ideal, baik dari pemenuhan SDM berkualifikasi sandi, SDM berkualifikasi IT, pemenuhan PALSAN dan APU, penyiapan ruangan atau area khusus untuk TKS / KASA maupun instrumen pendukung lainnya. Hal ini merupakan pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk dapat membentuk Unit Teknis Persandian dengan lebih ideal meskipun secara bertahap dari waktu ke waktu. Tentunya menjadi sebuah harapan yang ingin diraih dengan dilandasi komitmen yang kuat, bahwa suatu saat dengan semakin kuatnya sebuah Unit Teknis Persandian, akan dapat menjadi salah satu pilar penting dalam mengawal dan mengamankan sistem pemerintahan daerah khususnya di Kabupaten Muara Enim.

B. Saran

Sejak diberlakukannya UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadikan Persandian sebagai urusan wajib non pelayanan dasar, tentunya menimbulkan sebuah konsekuensi logis yang mengiringinya. Konsekuensi dimaksud adalah, munculnya penguatan pemahaman dan semangat revitalisasi terhadap arti penting pengamanan informasi berbasis persandian. Implikasi dari konsekuensi ini, tentunya juga membawa efek lanjutan, yaitu dalam hal kesiapan pemerintah daerah untuk memperkuat penyelenggaraan persandian di daerah masing-masing. Penguatan dimaksud adalah, mulai dari kesamaan persepsi dan komitmen unsur pimpinan daerah baik eksekutif maupun legislatif untuk melakukan penguatan fungsi persandian dalam aspek penganggaran maupun aspek kebijakan politik atau produk hukum yang menjadi pedoman aktivitas persandian, sampai dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh stake holder penyelenggara pemerintahan, terhadap kerawanan dan arti pentingnya keamanan informasi.

Berkaitan kondisi di atas, maka ada beberapa hal yang dapat disarankan kepada pemerintah pusat dalam hal ini adalah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan juga

penyelenggara persandian ditingkat provinsi yaitu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel.

1. Untuk Badan Siber dan Sandi Negara (Pemerintah Pusat)

Beberapa hal yang dapat diusulkan kepada BSSN, antara lain :

- Meningkatkan upaya pemerataan pemahaman kepada unsur pimpinan daerah baik eksekutif maupun legislatif terhadap arti pentingnya persandian dalam upaya pengamanan informasi
- Mendorong percepatan peningkatan kualitas layanan persandian. Dibidang sumber daya manusia, yaitu dengan menambah frekuensi dan kuota peserta diklat persandian (baik diklat pembentukan maupun diklat teknis). Dalam hal peralatan diharapkan ada percepatan pemenuhan kebutuhan baik PALSAN maupun APU, untuk didistribusikan ke seluruh pemerintah daerah.

2. Pemerintah Daerah Provinsi (wakil Pemerintah Pusat)

Adapun saran yang dapat disampaikan kepada pemerintah provinsi, yaitu :

- Meningkatkan frekuensi pembinaan baik berupa rakor, bintek, workshop, sosialisasi dan sebagainya terhadap pejabat maupun operator persandian di seluruh kabupaten / kota
- Meningkatkan frekuensi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan persandian dengan memperbanyak frekuensi supervisi ke pemerintah kabupaten / kota

Demikian laporan persandian pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun Anggaran 2020. Meskipun laporan ini belum sempurna, baik dari teknis pelaporan maupun dari segi kedalaman materi, namun Pemerintah Kabupaten Muara Enim akan selalu berupaya untuk melakukan segala upaya agar penyelenggaraan fungsi persandian akan semakin baik dari waktu ke waktu.

Muara Enim, Agustus 2021



LAMPIRAN I

**Daftar kelengkapan Sarana Kerja
di Pemerintah Kabupaten Muara Enim**

NO	SARANA PENDUKUNG	JUMLAH	KONDISI
1	2	3	4
	Sarana Kerja Administrasi a. Sarana Pengolah Data - Desktop - Laptop - Scanner - Printer b. Sarana Penyimpan Data - Hardisk - Flashdisk - CD - Box File - Brankas - Filling Cabinet - Lemari c. Sarana Komunikasi - Telepon - Faksimili - Sarana Internet - Radio e. Sarana Tulis Menulis - Ballpoint - Pensil - Penghapus - Spidol - Buku Kerja - Papan Tulis F. Sarana Penghancur Data - Alat Penghancur Kertas - Sarana Pembakaran - Gunting	2 2 1 2 1 bh 2 bh - - 1 bh 1 bh 1 bh - - 1 jaringan - 1 set 1 set 1 set 1 set 2 buah - 1 buah 1 buah 2 buah	baik baik baik baik baik baik baik baik baik baik baik baik baik baik baik baik baik baik baik baik baik baik baik baik baik baik baik baik
2	Sarana Kerja Kasa - Bahan sandi - Sarana Internet - Jaringan Telepon	1 set 1 jaringan 1 jaringan	Semua dlm kondisi Baik
3	Sarana Strong Room - Tabung Pemadam Kebakaran	1 unit	

4	Sarana Pendukung <ul style="list-style-type: none"> - Meja Kerja - Kursi Kerja - Generator Listrik - Pengatur Suhu - Tempat Sampah - Kalender - Jam dinding 	7 buah 7 buah 1 unit 2 buah 2 unit 2 buah 1 buah	Semua dlm kondisi Baik
5.	Sarana Pengamanan Fisik Pengamanan Terhadap Bahaya penyusup <ul style="list-style-type: none"> - Kamera Monitor (CCTV) - Piket Jaga 	1 set 2 orang	Semua dlm kondisi Baik



LAMPIRAN II

SISTEM ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

NO	Aplikasi Yang Mempunyai Fungsi	Daftar Aplikasi	Status (keaktifan : aktif / pasif)
A	Pelayanan Publik		
	1.Sektor Pendidikan	- DAPODIK (data Pokok Pendidikan)	aktif
	2.Sektor Kesehatan	- SIKNAS ONLINE (Sistem Informasi Kesehatan Nasional) - Sipermon - Siskohatkes - SITT - Siha - Portal Ditjen PPTM - SKDR - SIAF Online - Kesling Teradu Online - STBM Smart -SMS Gatway -Aplikasi Renbut SDMK -SIPNAP -SIMADA	Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif
	3.Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	- Jaringan Data Spasial Daerah (JDSD)	Aktif
	4.Sektor sosial		aktif
	5.Sektor Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		aktif
	6.Sektor Tenaga Kerja		aktif
	7.Sektor Pertanahan		aktif
	8.Sektor Lingkungan Hidup		aktif
	9.Sektor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) - Sistem KTP-Elektronik Perekaman (ENROLLMENT) - Pencetakan (B-CARD MANAGEMENT) - Statistik Rutin - Pendataan Keluarga	Aktif Aktif Aktif Aktif
	10.Sektor Perhubungan		
	11.Sektor Komunikasi dan Informatika	- Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Aktif Aktif

		<ul style="list-style-type: none"> - Sistem Pelayanan Informasi Kepada Masyarakat (SPIKM) - Website Pemerintah Kabupaten Muara Enim - Website PPID 	Aktif Aktif
	12.Sektor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem Penjaringan Aparatur Pmerintah Desa (SIMPAPDES) - Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) 	Aktif Aktif
	13.Sektor Lingkungan Hidup		
	14.Sektor Kebudayaan		
	15.Sektor Perpustakaan		
	16.Sektor Karsipan		
	17.Sektor Persandian		
	18.Sektor Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah		
	19.Sektor Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi Perizinan - Aplikasi arsip - Aplikasi SMS Gateway - Aplikasi GIS - Aplikasi Perizinan Online - Aplikasi Bedah investasi - Aplikasi Web DPM-PTSP - Aplikasi SPIPISE - Aplikasi NSWI - Aplikasi SIPJAKI 	Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif
	20.Sektor Statistik	<ul style="list-style-type: none"> - Simada - Sister (Sistem informasi sektoral terpadu) 	Aktif aktif
	21.Lainnya		
B	Administrasi dan Manajemen Umum		
C	Administrasi Legislasi	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) 	Aktif
D	Manajemen Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem Informasi Pengelolaan Database Perencanaan Pembangunan Kabupaten Muara Enim (Knowledge) - Sistem Informasi Pengelolaan Database Perencanaan Pembangunan Kabupaten Muara Enim (Knowledge Management System) - Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 	Aktif Aktif Aktif

		- Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	
E	Manajemen Keuangan (Siklus yang dimulai dari e-planning, e-budgeting,e-procurement,e-monitoring)	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) - Sistem Informasi Pengelolaan Database Perencanaan Pembangunan Kabupaten Muara Enim (Knowledge Management System) - Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) - Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) - Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Pembangunan Daerah (SIMDALBANGDA) - Sistem informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENBANGDA) - SIMDA Keuangan - Sistem Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA) - Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) - Aplikasi Pelayanan - Sistem Loket - Aplikasi SIM Gaji Taspen 	Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif
F	Manajemen Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem informasi manajemen Kepgawaiian - Website BKPSDM 	Aktif Aktif



LAMPIRAN III

RAHASIA

DAFTAR SDM PERSANDIAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
PERIODE JANUARI S.D DESEMBER 2020

NO	NAMA	NIP	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PKT/GOL	T M T	JABATAN	T M T	Agama	MASA			PENDIDIKAN									
									TH N	BL N	UM UM	TH M	PI M	T H	SANDI	TH N	TEK NIS	TH	PENGHARGAAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5	1	16	17	18	19	20	21
1	Candra Kuswara,Si P.MSI	197203241992031000	Tanjung Enim 24 Maret 1972	Penata II-d		Kasi Tata Kelola Persandian	Isla m	Isla m	10	S2	20	14			Diklat Sandiman Dasar	20	Harkan Palsan	20	21		
2	Yunita. SH	197106251994032000	Muara Enim 24 Juni 1971	Penata II-c		Kasi,Pengawas dan Evaluasi Persandian	Isla m	Isla m	10	S1	20	10			Juru Sandi	20	Juru Sandi	20	03		
3	Fahmiyati	196212241985032000	Karang Raja 04 Desember 1962	Pengatur TK.I/II-d		Staf	Isla m	Isla m	16	7	SMA	20	04			Juru Sandi	20	Juru Sandi	20	03	

Agustus 2021

Gubernur Muara Enim
Kepala Dinas Kominfo, Muara Enim



LAMPIRAN IV

RAHASIA

DAFTAR SDM BERKUALIFIKASI KEAMANAN INFORMASI
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER TAHUN 2020

No	Nama Personil	Sertifikasi Keahlian			Satuan Unit Kerja
		Jenis Sertifikasi	Tahun		
1	2	3	4	5	
1	Candra Kuswara, SIP, Msi	Sandiman Dasar	2009	Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	
2	Yunita, SH	Diklat Akses Sandi	2003	Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	
3	Fahmiyati	Diklat Akses Sandi	2003	Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	



Pembina Utama Muda
ARDIAN ARIFIN NARDI, AP, Msi
19740720 199311 1 001

LAMPIRAN V

**DAFTAR PERALATAN PERSANDIAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
PERIODE JANUARI S/D DESEMBER 2020**

No	Nama Barang (Palsan dan Kelengkapan)	Jumlah	Tahun Pengadaan	S/N	Kodefikasi	Nup	Nomor/Tanggal BAST	Keterangan (Kondisi)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kriptosoft Pro	1 Unit	2010	3338	306020700	14170	R.725/LSN/SU/06/2012	Dibuat BAST Baru dengan nomor. R.BA. 089/BSSN/PP.06.02/08/201
2	Secure VPN	1 Unit	2011	110402S 19191B	306020700	4	R.725/LSN/SU/06/2012	
3	Laptop Fujitsu	1 Unit	2011	515170- 01R1Y00834	310010200	3	15239	
4	WIP Room Jammer	1 Unit	2013	11026501S07723	306020700	4	R.725/LSN/SU/06/2012	
						31404	R.BA.102/LSN/PP.06.02/07.201	
						5		



LAMPIRAN VI

**DAFTAR PERSONIL / PEGAWAI BIDANG PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUARA ENIM**

TAHUN 2020

NO.	NAMA	Pangkat / Golongan	NIP	JABATAN	KEAHLIAN SANDI	KETERANGAN
1.	Iskandar, S.Kom, M.M	Pembina I/a	197806142006041006	Kepala Bidang	Non Sandi	
2.	Candra Kuswara, SIP, M.Si	Penata III/d	1977203241992031000	Kasi Tata Kelola Persandian	Ahli sandi Tk. I	
3.	Yunita, SH	Penata III/c	197106251994032004	Kasi Pengawasan dan Evaluasi Persandian	Juru Sandi	
4.	Ruslim Anwar, S.Kom	Penata III/c	198206262010011018	Kasi Keamanan Informasi	Non Sandi	
5.	Muhajirin Seprian Saputra, S. H	Penata Muda Tk. 1 III/b	198506262010011002	Staf	Non Sandi	
6.	Fahmiyati	Penata Muda III/a	196212241985032005	Staf	Juru Sandi	
7.	Septa Putra Anggara, S. Kom	Penata Muda III/a	199009122020021105	Staf	Non Sandi	

Agustus 2021
Kepala Dinas KOMINFO Muara Enim



ARDIAN ARIFANARDI, AP. Msi
MUAR A Pembina Utama Muda
19740720 199311 1 001

LAMPIRAN VII

RAHASIA

DAFTAR KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI

DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM 2020

No	Judul Dokumen Kebijakan/Prosedur Keamanan Informasi	Deskripsi Singkat	Tahun Terbit	Revisi ke - / Tahun
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
Dst.				



LAMPIRAN VIII

ORM KELENGKAPAN PERSONIL SDM DI BIDANG KEAMANAN INFORMASI (PENGAMANAN SISTEM ELEKTRONIK)

A. DATA PRIBADI

NO	NAMA	NOMOR TELEPON (KANTOR)	EMAIL
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ruslim Anwar, S.Kom	081271778819	Lubai.alek3@gmail.com-
2	Septa Putra Anggara, S.Kom	081272427629	Septaputraanggara@gmail.com

B. DATA PEKERJAAN

NO	NIP/NRP	PANGKAT/GOL. RUANG	TMT		JABATAN	TMT
			BULAN	TAHUN		
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	198206262010011018	Penata III/c	04	2018	Kasi keamanan informasi	05
						2019

2 | 199009122019021005

Penata Muda III/a

| 02 | 2019 | Pengelola keamanan informasi | 02 | 2019 |

C. DATA PENDIDIKAN

PENDIDIKAN		PELATIHAN DIBIDANG KEAMANAN INFORMASI/PERSANDIAN			SERTIFIKASI DIBIDANG KEAMANAN INFORMASI	
NO	JENJANG	TAHUN LULUS	NAMA PELATIHAN	TAHUN	NAMA SERTIFIKASI	TAHUN
(1)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	S 1	-	-	-	-	-
2	S 1	2007	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-



LAMPIRAN IX

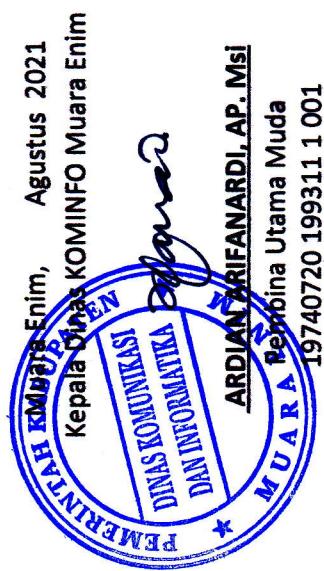
DAFTAR SISTEM ELEKTRONIK
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
TA 2020

NO	NAMA SISTEM ELEKTRONIK	KATEGORI SISTEM ELEKTRONIK (STRATEGIS/TI NGGI/RENDAH)	PENGELOLA SISTEM ELEKTRONIK	BENTUK PENGAMANA N MINIMAL YANG SUDAH TERPASANG*	PELAKSANAAN REKOMENDASI HASIL UJI (DALAM BENTUK PERSENTASE)			
					PELAKSANA	TAHUN	TELAH	SEDANG
1	Pendaftaran kemiskinan Kab Muara Enim	Tinggi	Dinas Sosial	PHP 5.5	-	-	-	-
2	Aplikasi bedah investasi	Tinggi	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan satu pintu	PHP 5.5	-	-	-	-
3	Aplikasi Perizinan	Tinggi	Dinas Penanaman Modal dan OS S	-	-	-	-	-
4	Si Cerdas	Tinggi	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan satu pintu	PHP 5.5	-	-	-	-
5	Mobile bedah investasi	Tinggi	Dinas Penanaman Modal dan Java	-	-	-	-	-
6	Sistem informasi lahan Pertanian dan irigasi (SILPI)	Tinggi	Dinas Pertanian	PHP 7.3	-	-	-	-
7	Sistem informasi sektoral terpadu (Sistem Beti)	Tinggi	Dinas Komunikasi dan informatika	PHP 7.3	-	-	-	-
8	Sistem Informasi Muara Enim Tinggi dalam Angka (Simada)	Tinggi	Dinas Komunikasi dan informatika	PHP 5.6	-	-	-	-
9	Sistem pelayanan informasi dan keluhan masyarakat (SPIKM)	Tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika	PHP 5.6	-	-	-	-

10	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID)	Tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika	PHP 5.6
11	Sistem inormasi Koperasi dan UKM (Simkop. UKM)	Tinggi	Dinas Koperasi dan UKM	PHP 7.0
12	Website database perdagangan Tinggi		Dinas Perdagangan	PHP 5.6
13	Sistem Informasi manajemen objek Pajak (SISMOP)	Tinggi	Badan Pendapatan Daerah	PHP 5.6
14	Sistem informasi manajemen perencanaan Pembangunan Daerah (Sisrenbangda)	Tinggi	Bappeda	PHP 5.6
15	Sistem informasi pengelolaan data base perencanaan Pembangunan Kabupaten Muara Enim	Tinggi	Bappeda	PHP 5.6
16	Website blower sistem	Tinggi	Inspektorat Kabupaten	PHP 7.3
17	SIMDABANGA (Sistem informasi pengendalian Pembangunan Daerah) J DIH	Tinggi	Bappeda	PHP 5.6
18		Tinggi	Bagian Hukum Setda	PHP 7.3
19	SIMPEG	Tinggi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	PHP 5.6
20	SAKIP	Tinggi	Bappeda	PHP 7.3
21	Sistem Penjaringan dan penyaringan Aparatur Pemerintah Dera	Tinggi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa FW YHH	PHP 7.3, my SQL 5.7,
22	Pojok Laboratorium Kelit bangan (pojok.lab.lit)	Tinggi	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	

Keterangan:

* Bentuk pengamanan minimal pada sistem elektronik misalnya telah terpasang firewall, menggunakan sertifikat elektronik, tersedia prosedur backup;



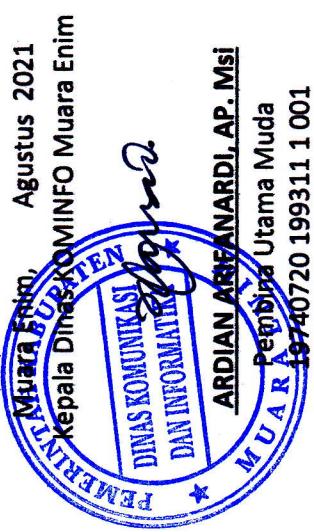
Agustus 2021
 Kepala Dinas KOMINFO Muara Enim
 ARDIAN ZARIFANARDI, AP. Msi
 Muara Enim Utama Muda
 19740720199311 1 001

LAMPIRAN X**DAFTAR KELENGKAPAN PENGELOLAAN DOKUMEN
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM****1. Ketersediaan Prosedur Pengelolaan Dokumen**

No	Prosedur	Ketersediaan		Identitas Prosedur	Tahun Terbit	Tahun Terakhir Revisi
		Ada	Tidak Ada			
1	Klasifikasi Informasi	-	✓		-	-
2	Jadwal Retensi Arsip	-	✓		-	-
3	Pemusnahan Arsip	-	✓		-	-
4	Permintaan Informasi/Dokumen	✓	-	1. SOP Permohonan Informasi Publik (No. 490/537/SOP- PPID/Diskominfo-II/2019) Tanggal 9 Desember 2019 / Rev. (No. 490/I.a/SOP/PPID- ME/2020) Tanggal 6 Juli 2020 2. Standar Pelayanan Informasi & Dokumentasi (No. 13.a/KPTS/Diskominfo/2021) Tanggal 11 Januari 2021	2019 2020 - - -	2020 - - - -
5	Distribusi informasi/dokumen	Sudah termaktub pada poin 4.	-		-	-

2. Pemusnahan Dokumen

No.	Dokumen Yang Dimusnahkan	Berita Acara		Pelaksana Pemusnahan
		Nomor Berita Acara	Tanggal	
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
Dst..	-	-	-	-



LAMPIRAN XI

DAFTAR LAYANAN KEAMANAN INFORMASI DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

T A 2020

No	Bentuk Layanan	Tahun	Masyarakat*	Pegawai**	Penerima Layanan	Perangkat Daerah***
1	Kontra pengindraan ruang dan kediaman Kepala Daerah	2017-2021		Kepala Daerah		
2						
Dst						

Keterangan:

* Dengan menyebutkan kelompok masyarakat, misal sekolah, atau jika masyarakat secara luas, cukup ditulis "Umum"

** Dapat menyebut perangkat daerah dimana pegawai tersebut berdinas, jika keseluruhan pegawai, cukup ditulis "Pegawai Pemda"

*** Dengan menyebutkan nama perangkat daerahnya.



19740720 199311 1 001

LAMPIRAN XII

DAFTAR POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI

DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

No	Nama JKS*	Perangkat Daerah/Unit Kerja yang terhubung	Media Komunikasi	Peralatan Sandi yang digunakan
1	-	-	-	-
2				
3				
Dst.				

Keterangan:

*JKS Internal Pemerintah Daerah yang menghubungkan antar perangkat daerah atau JKS Internal Perangkat Daerah yang menghubungkan unit kerja didalam perangkat daerah.

Muara Enim, Agustus 2021
Kepala Dinas Kominfo Muara Enim



Pembina Utama Muda
Muara Enim
Pembina Utama Muda
Muara Enim
197407201993111001

LAMPIRAN XIII

DAFTAR APLIKASI PERSURATAN ONLINE/ELEKTRONIK

DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

No	Nama Aplikasi Persurat	Pihak yang terhubung			Bentuk Pengamanan yang sudah terpasang	Media Akses			Jaringan Akses
		TU Perangkat Daerah	Es 1 dan Es 2	Semua Pejabat		Smartphone	PC/Laptop	Intranet	
1	SI CANTIK	V	V	V	-	V	V	-	V
2	SIMAYA	V	V	V	-	V	V	-	V

(khusus bagi Pemerintah Daerah yang pengelolaan suratnya sudah menggunakan sistem elektronik, misal e-surat



Muara Enim, Agustus 2021

Kepala Dinas Kominfo Muara Enim

ARDIAN AREFANARDI, AP. Msi

Permitia Utama Muda
NRP. 19740720 199311 1 001